

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 1 menyatakan: “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” (RI 2008). Pengendalian internal di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga dimensi berikut: (a) Efektif dan efisien; (b) Laporan pertanggungjawaban; dan (c) Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai pencapaian ketiga dimensi tujuan pengendalian intern tersebut, pimpinan memerlukan jasa auditor internal (*internal auditor*) dalam hal ini Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) sebagai lembaga pengawasan fungsional bertanggungjawab kepada pemimpin puncak Pemerintah Daerah (Effendi 2007). Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya termasuk didalamnya mengelola dana bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia (Ritonga 2004).

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia sudah menerapkan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang kemudian disebut Program Keluarga Harapan (PKH). PKH berbeda dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya ketika pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini lebih merupakan upaya untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kesejahteraan sosial mereka dan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang telah terjalin selama ini. PKH termasuk dalam klaster 1 pro-poor (berpijak untuk menanggulangi kemiskinan) yaitu program bantuan dan perlindungan sosial di Indonesia berdasarkan pengentasan kemiskinan. Seperti namanya, ini adalah program bantuan tunai bersyarat pendidikan dan kesehatan dengan landasan hukum Program Keluarga Harapan. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok paling miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH. Landasan hokum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan Prapenelitian pada Dinas Sosial Kota Kupang diperoleh data penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penyaluran Dana Bantuan PKH Kota Kupang Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALOKASI BANTUAN (Miliar)
1.	2016	3.593	7.206.112.792
2.	2017	5.893	9.257.320.000
3.	2018	9.909	1.997.400.000
4.	2019	11.566	43.524.900.000
5.	2020	11.069	41.573.700.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Kupang

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran bantuan untuk setiap kategori atau setiap tahun berbeda-beda. Di mana setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan. Dapat dilihat bahwa peningkatan besaran bantuan pada tahun 2018-2019 diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19 hampir seluruh dunia, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan selisih 1.951.200.000. Besarnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Kota Kupang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 7.206.112.792 untuk dibagikan kepada 3539 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana tersebut diberikan kepada masing-masing KPM sesuai dengan komponen yaitu penyaluran penerima manfaat PKH ini sangat bervariasi, yakni untuk SD sebesar Rp 900.000, SMP sebesar Rp 1.500.000, SMA sebesar 2.000.000 dan untuk ibu hamil sebesar Rp 3.000.000. Sedangkan pada tahun 2017 dana yang diberikan mengalami peningkatan sebesar Rp 9.257.320.000 untuk 5893 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2018 dana yang diberikan oleh Pemerintah mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp 1.997.400.000 untuk 9909 Keluarga Penerima

Manfaat (KPM). Dan pada tahun 2019 dana yang diberikan oleh Pemerintah sebesar Rp 43.524.900.000 untuk 11566 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian pada tahun 2020 dana yang diberikan Pemerintah Pusat sebesar Rp 41.573.700.000 untuk 11069 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran Bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH tidak disamaratakan, tidak seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penyaluran dana PKH dari Kementerian Sosial disalurkan melalui Bank Umum Milik Negara (BUMN). Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan Pengendalian yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang adalah dengan mengawasi pembagian PKH, menentukan penerima PKH, dan penggantian nama penerima PKH saat melakukan sosialisasi maupun musyawarah.

Tabel 1.2
Data Jumlah KPM Per Kelurahan Kota Kupang Tahun 2018-2020

KECAMATAN	KELURAHAN	TAHUN			
		2018 JUMLAH KPM	2019 JUMLAH KPM	2020 JUMLAH KPM	
ALAK	ALAK	416	478	459	
	BATUPLAT	160	185	170	
	FATUFETO	116	159	155	
	MANTASI	26	17	16	
	MANULAI II	223	245	229	
	MANUTAPEN	319	381	372	
	NAIONI	233	253	247	
	NAMOSAIN	538	663	589	
	NUNBAUN DELHA	138	179	174	
	NUNBAUN SABU	154	214	196	
	NUNHILA	94	121	116	
	PENKASE-OELETA	146	161	157	
	ALAK Total		2.563	3.056	2.880
	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	280	301	275
LASIANA		478	530	520	

	OESAPA	600	619	589
	OESAPA BARAT	362	382	378
	OESAPA SELATAN	32	31	32
KELAPA LIMA Total		1.752	1.863	1.794
KOTA LAMA	AIR MATA	37	55	47
	BONIPOI	17	28	33
	FATUBESI	112	142	146
	LAHILAI BISSI KOPAN	7	7	7
	MERDEKA	14	11	11
	NEFONAEK	33	50	43
	OEBA	49	79	58
	PASIR PANJANG	159	193	191
	SOLOR	48	62	56
	TODEKISAR	8	8	7
KOTA LAMA Total		484	635	599
KOTA RAJA	AIR NONA	168	215	183
	BAKUNASE	122	144	132
	BAKUNASE II	267	293	314
	FONTEIN	93	113	117
	KUANINO	107	127	118
	NAIKOTEN I	216	270	258
	NAIKOTEN II	37	54	50
	NUNLEU	61	84	102
KOTA RAJA Total		1.071	1.300	1.274
MAULafa	BELLO	190	207	209
	FATUKOA	248	274	287
	KOLHUA	183	204	197
	MAULafa	314	381	364
	NAIKOLAN	193	246	235
	NAIMATA	186	212	200
	OEPURA	344	451	458
	PENFUI	93	136	135
	SIKUMANA	439	514	440
MAULafa Total		2.190	2.625	2.525
OEBOBO	FATULULI	357	414	391
	KAYU PUTIH	141	143	138
	LILIBA	197	325	328
	OEBOBO	344	366	344
	OEBUFU	387	423	403
	OETETE	76	114	114
	TUAK DAUN MERAH	347	302	279
OEBOBO Total		1.849	2.087	1.997
Grand Total		9.909	11.566	11.069

Sumber : Dinas Sosial Kota Kupang

Data tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah KPM yang menerima PKH di setiap Kelurahan dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 merupakan tahun dimana terjadi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi jaring pengaman bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi belum memberikan manfaat optimal karena terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, sehingga di tahun 2020 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami penurunan. Dan dimana pada tahun 2018 jumlah KPM yang menerima PKH sebanyak 9.909 KPM. Pada tahun 2019 jumlah KPM yang menerima PKH mengalami peningkatan yaitu 11.566, sedangkan pada tahun 2020 jumlah KPM yang menerima PKH mengalami penurunan menjadi 11.069 KPM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan mengangkat judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kota Kupang Tahun Anggaran 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana Sistem pengendalian Internal Program Keluarga Harapan Tahun 2016-2020?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan ekonomi dalam kebutuhan peningkatan pendidikan dan kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas maka tujuan penelitian hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal Program keluarga harapan (PKH) yang diterapkan di Dinas Sosial Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan ekonomi dalam kebutuhan peningkatan pendidikan dan kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah salah satu referensi utama bagi pembaca yang tertarik untuk to pik yang serupa dan ingin melakukan

penelitian jauh lebih mendalam ataupun menjadi referensi sekunder jika ingin membahas topik yang tidak begitu berkaitan serta jika dibutuhkan dapat menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan data sekunder yang nantinya akan dicantumkan pada isi laporan penelitian ini.

2. Bagi Instansi Terkait

Bagi instansi terkait, semoga dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern PKH pada Kantor Dinas Sosial Kota Kupang.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang banyak hal seperti beberapa Peraturan yang terdapat dalam Pengendalian Internal Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya mengenai hal apa saja yang menghambat penerimaan dana bantuan PKH di Kota Kupang.